



**“Pengaruh Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar”**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*

Oleh:

FITRI RAHMADANI

NIM 1630402039

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH KONSENTASI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Rahmadani
NIM : 1630402039
Jurusan : Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“Pengaruh Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan berlaku.

Batusangkar, 17 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan



Fitri Rahmadani
NIM 1630402039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi atas nama **FITRI RAHMADANI, NIM: 1630402039** dengan judul “**Pengaruh Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar**”, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan Sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 14 Juli 2021

Ketua Jurusan Ekonomi
Syariah



Gampito, SE., M. Si
NIP. 19670219 200501 1 005

Pembimbing



Sri Adelia Fitri, SE., M. Si
NIP. 19830713 20060 2 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



Dr. H/ Rizal. M. Ag. CRP®
NIP/ 19731007 2002121 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang telah ditulis oleh **FITRI RAHMADANI**, Nim **1630402039** yang berjudul **“Pengaruh Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar”** telah di ujikan dalam Sidang *Munqasah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Jum’at tanggal 13 Agustus 2021, dan dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Ekonomi (S.E) Stara Satu (S1) dalam Bidang Ekonomi Syariah/Akuntansi Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Sri Adella Fitri, SE., M.Si NIP. 198307132006042002	Ketua Sidang		20-8-2021
2	Nasfizar Guspendri, SE., M.Si NIP. 197508232003121004	Anggota I		20-8-2021
3	Chitra Indah Sari, M.M., CRP NIP. 198505312019032005	Anggota II		19-8-2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar


Dr. H. Rizal. M. Ag. CRP®
NIP. 19731007 2002121 001

Motto

BELAJAR MENERAPKAN MANAJEMEN KEBATINAN

1. Belajar menyadari keberadaan diri sendiri
2. Mencoba mencapai prioritas tertinggi dalam mencapai tujuan hidup terbesar
3. Peduli tentang manusia, hewan dan segala sesuatu di alam semesta
4. Mencoba menyadari bahwa kita semua saling terhubung satu sama lain
5. Terpenuhi dalam kebahagiaan lahir bathin
6. Mencoba memahami bahwa diri adalah bagian dari alam semesta
7. Bersikap rendah hati, tidak egois, tidak sombong
8. Berusaha terhubung dengan tuhan, dan melihat makhluk sebagai kesatuan ilahi

**SETIAP KEPUTUSAN YANG KAMU PUTUSKAN SAAT INI,
AKAN KAMU HIDUPI DI KEMUDIAN HARI**

HALAM PERSEMBAHAN

Segala puji sayaucapkan atas nikmat hidup yang telah Allah SWT berikan kedalam kehidupan saya, segala kebahagiaan yang didapat, segala kesedihan yang saya tidak mengerti yang semua didasari ke egoan diri, dan dari semua tiap hirupan nafas yang tidak pernah saya syukuri. Solawat beserta salam tidak lupa pula saya ucapkan untuk pimpinan umat yaitu Nabi Muhammad SAW.

Untuk kedua orang tua saya sehat slalu ya mak pak panjang umur, saya ucapkan terimakasih atas semua perjuangan kalian dalam menghidupkan anak-anak kalian. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan dan ungkapkan selain panjang umur, semoga kalian bisa memetik hasil dari perjuangan kalain menghidupi anak kalian yang sangat-sangat buruk ini. Mudahan selesainya perkulihan ini dan anak kalian bekerja yang bisa membuat kalian duduk menikmati hari-hari kalian kedepanya. Doakan slalu anak mu ini ya mak, banyak hal yang membuat amak kecewa atas sikap dan harapan amak ke ipit. Buat apak sabar ya pak, bentar lagi pit akan jadi manusia pak. Sabar sebentar ya pak, nanti kalau sudah sampai di titik puncaknya dari hidup pit, kita akan berganti tubuh dan pikiran. Terimakasih dan maaf buat semua yang telah kalian berikan dan sikap ipit selama ini.

Untuk adeak-adek (Fitria Yuliana, Tri Amanda Perti, Adira Azahra) sabar yak, kalian akan memiliki tempat kalian pulang dimana kalian bisa didengar, mengeluh dan menangis tanpa ada satupun orang yang bisa ikut campur. Sukses slalu yak, kita tidak memiliki siapa-siapa selain kita-kita, mengertilah kekehidupan kedepanya. Mohon maaf sampai detik ini uni masih membuat kalian bersedih.

Buat hidup ku yang sudah hidup bahagia disisi_NYA terimakasih buat semua pelajaran hidup yang kalian berikan kemasa-masa kanak dalam hidup ipit. Mudahan inyiak atuak bahagia di sana, sebentar lagi ipit akan jadi manusia. Dimana banyak harapan ipit bisa didengar, dihargai, dianggap dan dijadi pertimbangan orang-orang dalam bersikap kedepanya. Terimakasih dan alfatihha buat atuak dan inyiak.

Harapan buat keluarga kedepanya, mudahan ini awal buat kita jadi satu, buat orang punya rumah terimakasih, tanpa kalian tidak ada awal dari kuliah ipit. Mudahan kalian bahagia slalu dilimpahkan kesehatan dan rezki melimpah. Buat Etek Na terkursus, terimakasih telah menjadi orang tua bagi kami sehat selalu ya tek.

Untuk teman-teman yang ikut direpotkan dalam skripsi ini buat Dika Aulia makasih yak, dan buat teman-teman yang slalu mendoakan, slalu bertanya. Terimakasih semuanya. buat semua teman-teman yang tidak bisa dibicarakan satu persatu. Buat teman online, makasih juga samapai ada yang diepotkan sampai ada yang mengisiin kuota.

Dan buat kakak Kun, kak makasih banyak-banyak, kakak hadir saat fit buta akan hidup dan kakak lah penerang tersebut. Cara tuhan memepertemukan kakak dan aku sangat-sangaat sempurna dengan caranya. Kak tepat satu tahun ini loh ya, mudahan kedepanya apapun niat-niat kita terwujud ya kak. Mudahan kita jadi manusia yang benar-benar seperti manusia yang diharapkan_NYA. Kak terimakasih sudah ada sampai detik ini, maaf kalau banyak dugaan-dugaan. Ia mudahan aku diterima kerja di cikarang ya kak. Jangan jadi sepertinyang fit takutkan ya kk, mudahan niat-niat baik kakak terwujud. Mudahan sukses ya kak. Bismillah...

Buat tetangga terimakasih pelajaran yang telah diberikan, mudahan jika niat baik. Mudahan buat manusia hidup berbahagia slalu, berhentilah melihat salah benar hitam putih sesuatu, sebab kebenaran hanya milik Allah, dan hitam putih tidak bisa jadi tolak ukur bagi sesuatu sebab jika melihat hitam putih tidak adil bagi mereka yang tidak memiliki penglihatan dengan mata.

Maaf banyak pihak yang tidak tersampaikan dalam hal ini, sehat lah slalu bahagia slalu, mudahan jadi manusia yang memanusiankan manusia.

**BUAT DIRI MENCoba MENgERTI, PAHAM DAN MENERAPKAN
APA ITU "SEDULUR PAPAN LIMOPANCER"**

ABSTRAK

Fitri Rahmadani, NIM : 1630402039, dengan judul skripsi: ” **Pengaruh Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar**”, Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun Akademik 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh Pengeluaran Rutin Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar, (2) Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar, (3) Pengaruh Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data skunder, dengan jenis data *time seris* tahunan periode 2004-2019 yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Tanah Datar. Variabel yang digunakan adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Tanah Datar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Pengeluaran Rutin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar, dibuktikan dengan nilai t hitung $>$ t tabel ($3.210 > 2.160$) dan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$, (2) Pengeluaran Pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar, dibuktikan dengan nilai t hitung $<$ t tabel ($1,617 < 2.160$) dan nilai signifikan $0,130 > 0,05$, (3) Pengeluaran Rutin dan Belanja Pembangunan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar, dibuktikan dengan nilai f hitung $>$ f tabel ($25,200 > 3,74$) dan nilai signifikan $0,001 < 0,05$.

Kata kunci : PDRB, Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan karunia-Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat beserta salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Saejana pada Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Adapun judul skripsi ini adalah, "Pengaruh Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar" Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih pada kedua orang tua tercinta dan tersayang, ayahanda Junaidi dan ibunda Afrida yang selama ini memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya dengan sepenuh hati, mendidik, membimbing dan selalu berusaha sekuat tenaga serta memberikan doa terbaik untuk kebahagiaan putrinya. Terima kasih tak terhingga untuk doa dan dukungannya, baik moril maupun materil sampai skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Rasa terima kasih yang tulus juga ingin penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang berperan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi sampai skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Immamora, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Bapak Dr. Rizal, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. Bapak Gampito, SE., M.Si Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

4. Ibuk Sri Adella Fitri S.E, M.Si selaku pembimbing penulis yang telah banyak berjasa dalam penulisan skripsi ini, beliau telah memberikan ide, saran, masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Nasfizar Guspendri, SE., M.Si dan ibuk Chitra Indah Sari, M.M., CRP sebagai Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan ide, sara dan masukan dalam menyelesaikan perbaikan dalam Skripsi ini.
6. Ibuk Yeni Melia, SE., MM selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak/ Ibu Dosen dan staff administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu mempermudah penulis melengkapi segala syarat yang dibutuhkan oleh akademik.
9. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah umumnya, angkatan 2016 khususnya dan juga para sahabat yang telah memberikan dukungan pada penulis selama masa perkuliahan.
10. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan semangat serta sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Semoga segala bantuan, dukungan dan do'a yang telah penulis terima dari berbagai pihak mendapat ridha Allah SWT dan menjadi Pengikat silaturahmi bagi kita semua. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Batusangkar, Agustus 2021
Penulis

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is stylized and appears to read 'Fitri Rahmadani'.

Fitri Rahmadani
NIM. 1630402039

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Perumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Dan Luaran Penelitian	5
G. Definisi Operasional	6

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori.....	8
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	8
a) Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	8
b) Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	9
2. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	10
a) Teori Klasik.....	10
b) Teori Pertumbuhan Harrod-Domar	11
c) Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan	12

d) Teori Keynesian	13
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	14
a. Faktor-faktor Ekonomi	14
b. Faktor Non Ekonomi	16
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	17
a. Metode Penghitungan.....	18
b. Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan	20
5. Anggaran.....	21
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	21
b. Penerimaan Daerah.....	22
c. Pengeluaran Pemerintah	32
6. Teori Pengeluaran Pemerintah	35
a. Model pembangunan tentang teori perkembangan pengeluaran pemerintah	35
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	37
C. Kerangka Berfikir	38
D. Hipotesis	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Tempat dan waktu penelitian	41
C. Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisis Data.....	42
1. Uji Kesesuaian.....	43
2. Uji Asumsi Klasik	45

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar.....	48
---------------------------------------------	----

1. Kondisi Geografis.....	48
2. Kondisi Penduduk	50
3. Mata Pencarian	54
B. Gambaran Perekonomian Kabupaten Tanah Datar.....	54
1. Perkembangan PDRB Kabupaten Tanah Datar	54
2. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	62
C. Deskripsikan Data	64
D. Analisi Data	68
E. Pembahasan Analisis Data	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Konstan	3
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian	39
Tabel 4.1 Letak Astronomis Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tanah Datar	46
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan dan Sex Ratio Kabupaten Tanah Datar.....	47
Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar	48
Tabel 4.4 Penduduk Kabupaten Tanah Datar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4.5 Perkembangan PDRB Atas Harga Konstan di Kabupaten Tanah Datar Menurut Lapangan Usaha.....	52
Tabel 4.6 PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Tanah Datar.....	55
Tabel 4.7 Distribusi PDRB Kabupaten Tanah Datar	57
Tabel 4.8 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	60
Tabel 4.9 PBRB Kabupaten Tanah Datar	61
Tabel 4.10 Regresi Linier Berganda	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas	64
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikoloneritas	66
Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi	67
Tabel 4.14 Hasil Analisis Model Summary b	68
Tabel 4.15 Hasil Uji F Statistik.....	69
Tabel 4.16 Hasil Uji t Statistik.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir	37
Gambar 3.1 Uji Statistik t	42
Gambar 3.2 Uji Autokorelasi	44
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot.....	65
Gambar 4.2 Grafik	70

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Data Pengeluaran Rutin (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2) Dan PDRB ADHK (Y) Kabupaten Tanah Datar 2004-2019 (Jutaan Rupiah)
- LAMPIRAN 2 Data Setelah di Logaritma Pengeluaran Rutin (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2) Dan PDRB ADHK (Y) Kabupaten Tanah Datar 2004-2019 (Jutaan Rupiah)
- LAMPIRAN 3 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanah Datar Menurut Lapangan Usaha (Rupiah) Dan PDRB AHKS (Persen) Tahun 2004-2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa otonomi daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional, pembagian dan pemamfatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya, dalam arti lain pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien (Suwandi, 2015 :2).

Setiap pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah perlu melakukan berbagai jenis pembelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki struktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan dan membiayai anggota polisi dan tetanta untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak terelakkan. Dengan adanya Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan, maka pemerintah mempunyai kewajiban mutlak dalam mengumpulkan sumber-sumber dana untuk mebiayai seluruh pengeluaran tersebut. Agar terwujud sasaran yang tepat dalam pengumpulan dana dan pembiayaan dalam suatu daerah maka pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD terdiri dari Penerimaan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana berimbang, pinjaman daerah, dan penerimaan yang lain-lain yang sah. Sumber pendapata asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang

terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana berimbang merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan kedalam Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan. Pengeluaran Rutin merupakan pengeluaran untuk penyelenggaraan roda pemerintah sehari-hari yang bersifat tetap dari tahun ke tahun. Pengeluaran Pembangunan merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat.

Pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah tanpa ikut campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah lebih leluasa dalam menerapkan pembangunan sesuai keinginan dan potensi di daerah tersebut, sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Setiap daerah tentu menginginkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi seperti: sumber alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian tenaga kerja dan skala produksi. Faktor non ekonomi seperti: sosial, manusia, politik dan administrasi. Pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode biasanya satu tahun. Metode perhitungan PDRB ada dua yaitu, metode langsung dan metode tidak langsung. Perhitungan PDRB itu sendiri ada dua yaitu perhitungan atas harga berlaku dan perhitungan atas harga konstan.

Menurut Keynes mengatakan bahwa pemerintah sangat berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari berbagai kebijakan yang dapat diambil Keynes lebih sering mengandalkan kebijakan fiskal. Dengan kebijakan fiskal

pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Langkah itu bisa dilakukan dengan menyuntikkan dana berupa belanja pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja (Deliarnov, 2007). Kebijakan ini sangat ampuh dalam meningkatkan output dan memberantas pengangguran, terutama pada situasi saat sumber-sumber daya belum dimanfaatkan secara penuh.

Menurut Rostow yang menghubungkan belanja pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal, tahap ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah harus tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas (Jhingan, 2014).

Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Wagner menamakan hukum peningkatan peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan.. Belanja pemerintah daerah merupakan salah satu faktor lain yang menentukan tingkat Pertumbuhan Ekonomi. Dimana belanja pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan alokasi pengeluaran pembangunan agar mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi (Idris, 2018:35). Namun, jika belanja pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi belanja pemerintah yang profesional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.1
Kabupaten Tanah Datar
Atas Dasar Harga Konstan

No	Tahun	Pengeluaran Rutin	Pengeluaran Pembangunan	Laju Pertumbuhan PDRB
1.	2017	Rp. 854.078.384	Rp. 197.916.990	5.11 %
2.	2018	Rp. 916.510.091	Rp. 158.319.176	5.04 %
3.	2019	Rp. 945.473.460	Rp. 202.885.384	4,99 %

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar adalah daerah agraris, lebih 70% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Di Kabupaten Tanah Datar sektor pertanian yang dominan, sebab sektor pertanian jadi penentu pertumbuhan ekonomi, jika sektor ini melambat maka berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Dari data BPS, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 03.26 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 0.15 persen sedangkan pada tahun 2019 sebesar 02.27 persen.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian ini dengan judul *“Pengaruh Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tanah Datar”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemberian Otonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
2. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
5. Pengaruh Belanja Rutin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
6. Pengaruh Blanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

D. Perumusan Masalah

Adapaun Perumusan Masalah Yang Akan Dibahas Adalah:

1. Adakah terdapat Korelasi Pengaruh Pengeluaran Rutin Daerah Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar?
2. Adakah terdapat Korelasi Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tanah Datar?
3. Apakah Pengeluaan Rutin Dan Pengeluaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar?

E. Tujuan Penelitain

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan mengenai sasaran maka peneliti harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adakah Pengaruh Pengeluaran Rutin Daerah Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui adakah Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui Apakah Pengeluaan Rutin Dan Pengeluaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

F. Manfaat Dan Luaran Penelitain

1. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi Peneliti
 - 1) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
 - 2) Sebagai wadah untuk aplikasi teori-teori yang telah diperoleh pada bangku perkuliahan dan dijadikan sebagai alat pembahasan.

3) Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang pertumbuhan ekonomi.

b. Bagi Pihak Akademik

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat sebagai dasar penelitian selanjutnya.

2. Luaran Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi referensi dipergustakaan IAIN Batusangkar dan menjadi panduan atau tambahan rujukan bagi penulis skripsi selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul Skripsi ini maka penulis akan menjelaskan maksud dari istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian. Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas (*Independent variable*) atau Variabel X dan variabel terikat (*Dependent variable*) atau variabel Y. Dimana variabel independen adalah Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar sedangkan untuk variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

1. Pengaruh Pengeluaran Rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengeluaran rutin adalah belanja yang penggunaannya untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah (jutaan rupiah). Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang bersifat tetap dari tahun ke tahun

2. Pengeluaran Pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengeluaran Pembangunan adalah belanja yang penggunaannya diarahkan dan di nikmati langsung oleh masyarakat (jutaan rupiah) yang efek

dari pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah dapat dirasakan efeknya oleh masyarakat di daerah tersebut.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi yang dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode biasanya satu tahun. Metode perhitungan PDRB ada dua yaitu, metode langsung dan metode tidak langsung. Perhitungan PDRB itu sendiri ada dua yaitu perhitungan atas harga berlaku dan perhitungan atas harga konstan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

a) Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesenambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Putra, 2018:41).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya (Gampito, 2016:27).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu "proses" bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian yang berkaitan dengan output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat dalam waktu yang panjang.

b) Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya – sumber daya, dan ada yang membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Sumarsono, 2017:5).

Perkembangan teori ekonomi pertumbuhan dan meningkatnya ketersediaan data daerah mendorong meningkatnya perhatian terhadap ketidak merataan pertumbuhan daerah. Teori ekonomi pertumbuhan dimulai oleh Robert Solow yang dikenal dengan model pertumbuhan neo-klasik. Dan beberapa ahli ekonomi Amerika mulai menggunakan data-data daerah. Pengelolaan APBD untuk pengeluaran daerah yang didistribusikan pada sektor-sektor pembangunan akan mendorong pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Untuk melihat ketidak merataan pertumbuhan ekonomi regional dapat ditentukan dengan beberapa cara. Secara umum dalam menghitung pertumbuhan dengan:

- 1) Pertumbuhan output
- 2) Pertumbuhan output pekerja
- 3) Pertumbuhan output perkapita

Pertumbuhan output digunakan untuk mengetahui indikator kapasitas produksi. Pertumbuhan output per pekerja seringkali digunakan untuk mengetahui indikator dari perubahan tingkat kompetitifitas daerah, sedangkan pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai indikator perubahan dari kesejahteraan.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi regional harus dibandingkan dengan tingkat pendapatan regional dari tahun ke tahun atau dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$g_t = \frac{\Delta PDRB}{PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

Dimana : g_t = Pertumbuhan Ekonomi
 $PDRB$ = Produk Domestik Regional Bruto
 Δ = Perubahan

2. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

a) Teori Klasik

Menurut Smith, yang belum menyadari hukum hasil yang makin berkurang, perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi karena ia akan memperluas pasar. Sedangkan menurut Ricardo dan Malthus, perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan memperbesar jumlah penduduk hingga menjadi dua kali lipat dalam satu generasi, akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke hal yang lebih rendah (Sukirno, 2006:246).

Pertumbuhan penduduk pada umumnya tidak diikuti oleh penambahan lahan, sehingga mulai dirasakan bahwa tanah/lahan semakin sempit. Oleh karena itu pekerja-pekerja baru akan mendapat lahan yang semakin sempit untuk digarap. Pada saat seperti ini barulah berlaku konsep *the Law of Diminishing Returns*. Teori klasik juga mengemukakan keterkaitan antara jumlah pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk. Teori tersebut disebut Teori Penduduk Optimum. Teori ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Ketika produksi marginal lebih tinggi daripada pendapatan perkapita, jumlah penduduk masih sedikit dan tenaga kerja masih kurang. Maka penambahan penduduk akan menambah tenaga kerja, dan menaikkan pertumbuhan ekonomi.

(b) Ketika produk marginal makin menurun, pendapatan nasional semakin naik tetapi dengan kesepakatan yang lambat. Maka penambahan penduduk akan menambah tenaga kerja, tetapi pendapatan perkapita menurun namun pertumbuhan ekonomi masih ada meskipun kuantitasnya semakin kecil.

Ketika produk marginal lainnya sama dengan pendapatan perkapita, artinya nilai pendapatan perkapita mencapai maksimum dan jumlah penduduk optimal (jumlah penduduk yang sesuai dengan keadaan suatu negara yang ditandai dengan pendapatan perkapita mencapai maksimum). Sehingga penambahan penduduk akan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut kaum klasik bahwa hukum *The Law of Diminishing Returns* menyebabkan tidak semua penduduk dapat dilibatkan dalam proses produksi. Jika hal ini dipaksakan justru akan menurunkan output nasional. Pertambahan tenaga kerja yang diikuti pertambahan produk terjadi apabila pertambahan tenaga kerja diikuti dengan pertambahan modal.

Dasar pemikiran dari teori klasik adalah pembangunan ekonomi dilandasi oleh sistem liberal, yang mana pertumbuhan ekonomi dipacu oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Jika keuntungan meningkat, tabungan akan meningkatkan stok modal yang ada.

b) Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dibangun berdasarkan pengalaman negara maju. Kesemuanya terutama di alamatkan kepada perekonomian kapitalis maju dan mencoba menelaah persyaratan pertumbuhan mantap (*steady growth*) dalam perekonomian seperti itu.

Harrod dan domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama dengan menciptakan pendapatan, kedua ia memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan

stok modal. Yang pertama dapat disebut sebagai “dampak permintaan” yang kedua “dampak penawaran” investasi.

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Teori Harrod-Domar ini mempunyai asumsi yaitu:

- 1) Perekonomian dalam keadaan pekerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- 2) Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
- 3) Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- 4) Kecendrungan untuk menabung besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output dan rasio pertambahan modal-output.

Menurut Harrod-Domar setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak (Jhingan, 2014:230). Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output.

Dalam hal ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh.

c) **Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan**

Model ini mengasumsi bahwa negara-negara menggunakan sumber dayanya secara efisien, dan terdapat imbal hasil yang selalu berkurang terhadap peningkatan modal dan tenaga kerja.

Dari dua asumsi ini terdapat tiga prediksi penting, yaitu:

1. Peningkatan modal per tenaga kerja menciptakan pertumbuhan ekonomi selama masyarakat dapat terus memberikan modal secara produktif.
2. Negara-negara miskin dengan tingkat modal perkapita yang rendah akan tumbuh lebih cepat karena setiap investasi dari modal akan menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki modal lebih besar.
3. Dikarenakan adanya *diminishing returns* terhadap modal, tingkat ekonomi akan mencapai suatu keadaan dimana peningkatan modal baru tidak akan mencapai suatu keadaan dimana peningkatan modal baru tidak akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini disebut dengan *steady state* (Nurul, 2015:107).

Menurut teori ini garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori Harrod-Domar, dimana asumsi yang melandasi model ini yaitu:

- 1) Tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu.
- 2) Adanya fungsi produksi yang berlaku bagi setiap periode.
- 3) Adanya kecenderungan menabung oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi tertentu dari output.
- 4) Semua tabungan masyarakat di investasikan sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan menabung, maka output disisakan sejumlah proporsi untuk menabung dan kemudian di investasikan, dengan begitu maka terjadi penambahan stok capital.

d) Teori Keynesian

Teori ini dipelopori oleh John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek output nasional dan kesempatan kerja terutama ditentukan oleh permintaan agregat. Beberapa teori yang dikemukakan oleh Keynes antara lain secara ringkas bahwa pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang

dihasilkannya, demikian juga sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan keseimbangan pekerja dan pendapatan. Permintaan efektif yang terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi ini, ditentukan pada saat permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat (Nurul, 2015: 99-100).

Keynes mengemukakan beberapa syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu:

- a) Kemampuan dalam mengendalikan penduduk
- b) Kebulatan tekak menghindari perang dan perselisihan sipil
- c) Kemauan untuk mencapai ilmu pengetahuan, memedomini hal yang benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan.
- d) Tingkat akumulasi yang ditemukan oleh margin antara produksi dan konsumsi.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi seperti yang dijelaskan dibawah ini:

a. Faktor-faktor Ekonomi

1) Sumber Alam

Sumber alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Suatu Negara yang kekurangan sumber daya alam tidak akan membangun dengan cepat. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya.

Di Negara berkembang sumber daya alam sering terbengkalai karena kurang atau salah pemanfaatan tetapi tersedianya sumber alam secara melimpah tidak cukup untuk pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang diperlukan adalah bagaimana cara pemanfaatannya secara tepat. Jika sumber daya alam tidak dipergunakan secara tepat suatu negara tidak

akan mungkin mengalami apa yang disebut kemajuan, jika sumber alam dapat dikembangkan melalui perbaikan teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan. Sumber daya alam yang dimaksud di antaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

Dengan begitu perekonomian akan mengalami kemajuan. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi kekayaan alam yang melimpah saja belum cukup, yang penting ialah pemanfaatannya secara tetap dengan teknologi yang baik sehingga efisiensi dipergunakan dalam waktu yang cukup lama.

2) Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu akan disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Proses pembentukan modal akan menaikkan output nasional dalam berbagai cara. Investasi dibidang barang modal tidak hanya menaikkan produksi tetapi juga dapat menaikkan kesempatan kerja. Pembentukan modal dapat pula membawa kearah penggalan sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar untuk kemajuan ekonomi.

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktifitas (Putra, 2018:41).

3) Organisasi

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi, yang bersifat komplemen bagi modal, buruh dan membantu menaikkan produktifitas. Dalam pertumbuhan ekonomi moderen peranan wiraswasta sangat penting, wiraswasta tampil sebagai

organisator sekaligus orang yang berani mengambil resiko diantara ketidak pastian. Di Negara sedang berkembang peranan pemerintah sangat besar dalam penyediaan *overhead* sosial. Perekonomian kebanyakan dijalankan oleh pemerintahan pusat dan daerah. Perusahaan yang pada umumnya dikelola pemerintah seperti perusahaan umum yang mencakup pertambangan, perkebunan, perdagangan, penyaluran bahan mentah, dan kebutuhan pokok, produksi barang modal dan sebagainya.

4) Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja akan meningkatkan produktifitas. Kedua hal tersebut akan dapat mengiringi perekonomian ke arah ekonomi produksi dengan skala besar yang selanjutnya dapat membantu perkembangan industri. Dan seperti kita ketahui perekonomian industri akan cepat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Adam Smith spesialisasi dapat meningkatkan produktifitas buruh yang dapat memacu kenaikan pertumbuhan ekonomi akan tetapi juga dipengaruhi oleh luas pasar. Luas pasar akan meningkat dari perekonomian yang meningkat hal tersebut dapat terjadi melalui besar kecilnya tingkat permintaan, banyak tidaknya tingkat produksi, tersedia atau memadai sarana transportasi dan sebagainya. Jika skala produksi besar atau luas maka pembagian kerja dan spesialisasi juga akan semakin luas. Dengan demikian output akan dapat ditingkatkan dan dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat (Parera, 2018 :26).

b. Faktor Non Ekonomi

Yang termasuk faktor-faktor non ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Faktor Politik dan Administrasi Pemerintah

Politik yang tidak stabil serta pemerintah yang lemah dan korup sangat menghambat kemajuan ekonomi.

b. Aspek Sosial Budaya

Aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat meliputi antara lain sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat motifasi kerja, kelembagaan masyarakat dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan itu.

c. Susunan dan Tertib Hukum

Susunan dan tertib hukum Susunan dan tertib hukum dan peraturan perundang-undangan yang keliru sering kali menghambat kemajuan ekonomi sehingga tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi (Rapanna, 2017 :37)

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik bruto (PDRB) menurut badan pusat statistik adalah jumlah nilai tambah oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya (Faried, 2019:86).

PDRB adalah salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi yang biasanya juga digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan menjadi tolak ukur dalam menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang.

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam

periode tahun tertentu yang umumnya dalam kurun waktu satu tahun (Pramono, 2019: 51). PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kelender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa.

a. Metode Penghitungan

Ada dua metode yang dapat dipakai untuk menghitung PDRB yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

1. Metode Langsung

Penghitungan didasarkan sepenuhnya pada data daerah, hasil penghitungannya mencakup seluruh produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Pemakaian metode ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:

a) Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu: pertanian; pertambangan dan pengendalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan; hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan; persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa.

b) Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses

produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah umpan dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

PDRB adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

c) Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Komponen-komponen tersebut meliputi:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung
2. Konsumsi pemerintah
3. Pembentukan modal tetap domestik bruto
4. Perubahan stok
5. Ekspor *netto*

2. Metode Tidak Langsung

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah nasional ke dalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut.

Dalam metode ini, nilai tambah disuatu wilayah diperoleh dengan mengalokasikan nilai tambah suatu kegiatan ekonomi nasional kedalam masing-masing kegiatan ekonomi pada tingkat regional dengan menggunakan indikator yang mempunyai pengaruh paling erat dengan kegiatan ekonomi tersebut (Soemitro, 2003: 3).

b. Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Hasil penghitungan PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

1) Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku

Pengertian Produk Domesti Regional Bruto atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah yang dimaksud merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambah ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh NTB atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. NTB atas dasar harga berlaku yang didapat dari pengurangan NPB/Output dengan biaya antara masing-masing dinilai atas dasar harga berlaku. NTB menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi yang dihasilkan oleh tingkat perubahan harga dari masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor.

2) Penghitungan Atas Dasar Harga Konstan

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya memulai produk domestik regional bruto riilnya.

Perhitungan PDRB atas harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB yang kenaikannya tidak dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga. Ada 4 cara untuk menghitung nilai tambah bruto atas dasar harga konstan:

a. Revalisi

Metode ini dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar. Hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan

b. Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas harga konstan yang diperoleh dengan cara menghasilkan nilai tambah dasar dengan indeks produksi

c. Deflasi

Nilai tambah atas harga konstan diperoleh dengan berbagai nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing dengan indeks harga.

d. Deflasi Berganda

Dalam deflasi berganda ini, yang dimaksud dengan deflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut (Wardana, 2010 :4)

5. Anggaran

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas serta estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan mendatang (Halim, 2007 :36). APBD adalah Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu. Kebanyakan organisasi sektor publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran.

APBD di susun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan

untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.

b. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah atau pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah terdiri dari sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengalami pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai pewujudan atas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat (Sudaryo, 2017: 105).

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak diatur dalam pp No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 34 Tahun 2000 (Supramono, 2010 :6) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 ayat (10), bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak dikelola oleh provinsi menyebutkan jenis-jenis pajak daerah yaitu:

- a. Jenis pajak daerah tingkat I terdiri dari:
 - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- b. Jenis pajak daerah tingkat II terdiri dari:
 - Pajak hotel dan restoran
 - Pajak reklame
 - Pajak penerangan jalan
 - Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
 - Pajak pemamfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Tarif pajak daerah tingkat I ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan penetapannya seragam diseluruh Indonesia. sedangkan untuk daerah tingkat II ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan peraturan daerah tentang pajak daerah tidak dapat berlaku surut. Memperhatikan sumber pendapatan asli daerah masing-masing sangat bervariasi (Wulandari, 2018: 58).

b. Retribusi Daerah

Pemeriman pemerintah selain dari pajak daerah dan dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan kepada pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disajikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2013 :15).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat 2 retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, antara lain:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi umum adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan kesampahan/kebersihan
- c) Retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- d) Retribusi pelayanan pemakanan dan pengabungan mayat
- e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f) Retribusi pelayanan pasar
- g) Retribusi penguji kendaraan bermotor
- h) Retribusi alam pemadam kebakaran
- i) Retribusi pengantian biaya cetak peta
- j) Retribusi pengujian kapal perikanan

Jenis retribusi jasa umum untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten / kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa adalah pelayananyang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dengan prinsip komersial meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan/mamfaatkan kekayaan daerah yang belum dimamfaatkan secara optimal
- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sasaran, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Mardiasmo, 2013 :15).

Jenis Retribusi Perizinan tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. UU No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika terhadap pengelolaan tersebut mendapatkan laba, maka laba dapat dimasukkan sebagai salah satu pendapatan asli daerah (Wulandari, 2018: 34-35). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan miliki daerah/ badan usaha milik daerah (BUMD)
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah / badan usaha milik negara (BUMN)
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal ada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

Bagi daerah yang memiliki usaha BUMD seperti perusahaan daerah air minum (PDAM, Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pasanggahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan. Pengelolaan kekayaan daerah yang dilaksanakan dengan tetap, transparan dan profesional akan menghasilkan pendapatan daerah yang besar memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pendapatan daerah. Hal ini tidak terlepas dari potensi yang dimiliki suatu daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Dearah yang Sah

Pendapatan ini merupakan pendapatan daerah yang tidak dapat dimasukkan dalam pendapatan asli daerah maupun dana berimbang. Pendapatan ini terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendaotan hibah bersumber dari pihak lain (dari dalam negeri maupun luar negeri) yang diberikan dengan tidak dengan mengikat dan tidak ada kewajiban bagi daerah untuk

mengembalikannya. Selain hibah pendapatan lain yang termasuk dalam lain-lain pendapatan adalah dana darurat (Anggoro, 2017 :34).

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendaptan bunga
- 4) Keuangan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- 5) Komisi, pemotongan, atupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

1. Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Selain dari pendapatan asli daerah, sumber penerimaan pemerintah otonom kabupaten/kota berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah salah satu bentuk kebijakan desentralisasi dibidang fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Secara ideal tujuan kebijakan adalah:

- a. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah yang selama ini tertinggal dibidang pembangunan
- b. Untuk mengintensifikan aktifitas dan kreatifitas perekonomian masyarakat daerah yang berbasis pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pemerintah daerah dan DPR bertindak sebagai fasilitator dalam pembangunan daerah, rakyat dan masyarakat harus berperan aktif dalam perencanaan pembangunan daerahnya.
- c. Mendukung terwujudnya *good govermance* oleh pemerintah daerah melalui perimbangan keuangan yang transparan

- d. Untuk menyelenggarakan otonom daerah secara demokratis, efektif dan efisien dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional serta memiliki akhlak atau moral yang baik.

Oleh sebab itu desentralisasi fiskal yang dilaksanakan melalui perimbangan keuangan akan meningkatkan kemampuan daerah untuk membangun dan meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat daerah.

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dana berimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri yaitu:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang di alokasikan dengan tujuan dengan pemerataan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Dana alokasi umum berujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Sudaryo, 2017 :114)

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada

daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN, yang dimaksud sebagai daerah pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah, yang penggunaannya dapat ditentukan sepenuhnya oleh daerah (Patarai, 2016 :200). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana dasar di daerah.

Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sasaran dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

2. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan/atau untuk menutup kekurangan kas, yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undang. batas maksimal kumulatif pemerintah dan pemerintahan daerah tidak boleh melebihi 60% dari Produk Domestik Bruto tahun yang bersangkutan (Pamungkas, 2013 :38)

Adapun sumber-sumber pinjaman daerah yaitu:

1. Pinjaman daerah dari dalam negeri bersumber dari:
 - a. Pemerintah pusat. Ketentuan-ketentuan mengenai pinjaman yang bersumber dari pemerintah yang bersumber dari pemerintah pusat seperti: jenis, jangka waktu pinjaman, masatenggang, tingkat bunga, cara penghitungan dan pembayaran bunga, pengadministrasian dan penyaluran dan pinjaman, ditetapkan oleh menteri keuangan.

- b. Lembaga keuangan bank. Pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Lembaga keuangan bukan bank. Pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Masyarakat. Pinjaman dari melalui penerbitan obligasi daerah. Pelaksanaan dan pembayaran kembali obligasi daerah mengikuti peraturan yang berlaku.
 - e. Sumber lainnya. Pinjaman daerah lainnya berasal pemerintah daerah lain.
2. Pinjaman daerah dari luar negari dapat berubah pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

Dana pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditunjukkan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Selain itu, daerah dimungkinkan melakukan pinjaman untuk mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan kas daerah.

Pinjaman daerah harus disesuaikan dengan kemampuan daerah, karena dapat menimbulkan beban APBD tahun-tahun berikutnya yang cukup berat sehingga perlu didukung dengan keterampilan perangkat daerah dalam mengelola pinjaman daerah.

3. Lain-Lain Penerimaan Daerah Yang Sah

Lain-lain penerimaan yang sah mencakup hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan lain-lain

yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam dan luar negeri. Pendapatan dana darurat merupakan bantuan pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditangulangi APBD.

c. **Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Soediyono, pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa hanya disebut pengeluaran pemerintah, *government expenditure* atau *government purchase* meliputi semua pengeluaran dimana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai konsumsi pemerintah, kegiatan-kegiatan dan pengeluaran lainnya guna tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah harus mampu mencapai beberapa sasaran, seperti peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil-hasil pembangunan. Pelaksanaannya digunakan barang-barang dan jasa dengan berbagai bentuk termasuk berupa uang. Penggunaan uang untuk melaksanakan fungsi pemerintah inilah yang dimaksudkan dengan

pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat juga diartikan sebagai penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat.

Pengeluaran pemerintah yang digunakan baik pemerintah pusat maupun daerah meliputi dua jenis yaitu:

a. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan aktifitas pemerintah sehari. Anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dari efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain diupayakan melalui pinjaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen/lembaga negara non departemen dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang bersifat tetap dari tahun ke tahun. Pengeluaran ini terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai, yaitu pembayaran untuk membayar gaji pegawai negeri, tunjangan dan pensiun.
- b. Belanja Barang, yaitu pengeluaran untuk membeli barang, peralatan, atau perlengkapan untuk keperluan pemerintah
- c. Belanja Rutin Daerah, yaitu pengeluaran untuk membayar gaji pegawai pemerintah daerah

- d. Bunga Dan Cicilan Utang, yaitu pengeluaran untuk membayar cicilan pinjaman dalam negeri dan luar negeri beserta bunganya.
- e. Subsidi, yaitu pengeluaran negara untuk subsidi BBM dan Non-BBM
- f. Pengeluaran Rutin Lainnya, yaitu pengeluaran untuk selain keperluan-keperluan yang telah disebutkan.

Pengeluaran Rutin harus dapat dibiayai dari pendapatan daerah sendiri sesuai pasal 64 ayat 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di Daerah. Dari posko-posko pengeluaran rutin Pemda tingkat II yang ada kemudian dirinci menurut sepuluh jenis belanja rutin yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, angsuran kredit/hutang dan bunga, ganjaran subsidi, dan sumbangan untuk daerah bawahan, pensiun dan bantuan, kontes yang tidak termasuk bagian lain, dan kontes tidak tersangka (Badan Pusat Statistik 2020).

b. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran Negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, dalam artian dapat diartikan sebagai pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditunjukkan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu dapat disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang direncanakan.

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat sesuai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu.

Semakin besar dan semakin banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Pengeluaran ini bersifat tidak tetap dan bergabung pada proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan (Indriani, 2007:64-65).

6. Teori Pengeluaran Pemerintah

a. Model pembangunan tentang teori perkembangan pengeluaran pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas.

Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave rasio investasi total terhadap pendapatan nasional akan semakin mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjutan pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

(1) Hukum Wegner

Pengamatan empiris oleh Wegner terhadap Negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktifitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wegner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional.

Wegner menekankan hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (*law of ever increasing state activity*).

(2) Teori Paacock dan Wiseme

Paacock dan Wiseme adalah dua orang yang mengkur teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah terbaik. Pandangan mereka mengenai pengeluaran pemerintah adalah bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Menurut Paacock dan Wiseme, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah.

Apabila keadaan normal jadi terganggu, katakanlah karena perang atau ekstabilitas lainnya maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan dimaksud. Konsensuensinya timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar.

(3) Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menmbulkan permintan akan barang publik akan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain (Idris, 2018:34).

Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor dibawah ini:

- (a) Perubahan permintaan akan barang publik
- (b) Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan
- (c) Perubahan kualitas barang publik
- (d) Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi

Sebagai contoh, misalnya pemerintah akan membuat sebuah pelabuhan udara baru. Pelaksanaan pembuatan pelabuhan udara baru tersebut menimbulkan permintaan akan barang lain yang dihasilkan oleh sektor swasta, seperti semen, baja, alat-alat pengangkutan dan sebagainya.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Christian Lendy Koyongian, dkk (2010) dengan judul: “**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah , investasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado. Teknisk analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda/ *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil analisis secara persial atau sendiri dengan Uji t, variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado sedangkan variabel investasi dan tenaga kerja berpengaruh dan signifikan . Hasil analisis secara simultan atau bersama-sama dengan Uji F menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Madano. Kontribusi yang diberikan oleh ketiga variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado (*R Square*) sebesar 65,8%.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indra Susila, dkk (2018) dengan judul: “**Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat". Penelitian ini bertujuan membuktikan dan menganalisis sejauh mana pengaruh belanja rutin, belanja pembangunan, dan investasi (pembentukan modal tahap bruto) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sumatera barat. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder runtun waktu (*time series*) tahunan dari tahun 1997-2011. Alat analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ekonometrika dengan persamaan regesi berganda. Dari hasil analisis data penelitian diperoleh bahwa variable belanja rutin (X1) secara persial tidakberpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, variabel belanja pembangunan (X2) secara persial berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, dan variabel investasi (X3) secara persial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

Perbedaan dan fokus penelitian sebelumnya dengan penlitian ini dengan judul penelitian **“Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar**". Dan penelitian ini bertujuan membuktikan dan menganalisa sejauh mana pengaruh Belanja Pemerintah (Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan) terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder runtun waktu (*time series*) tahunan dari tahun 2004-2019. Alat analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ekonometrika dengan persamaan regesi berganda.

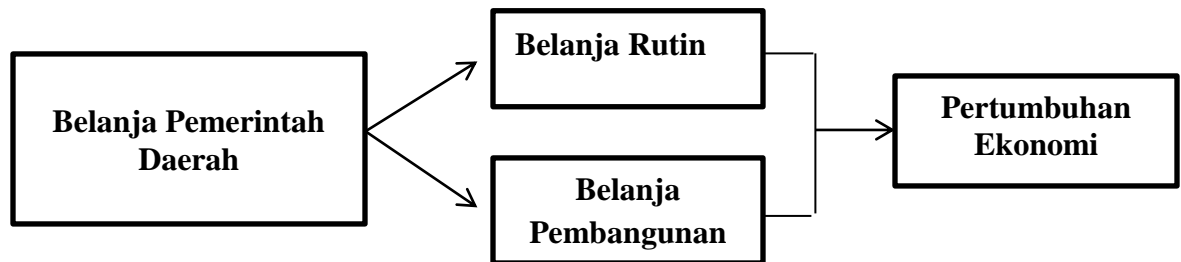
C. Kerangka Berfikir

Sebagaimana telah dijelaskan dilatar belakang, bahwa APBD disusun demi mencapai sasaran yang tepat dalam pengumpulan sumber dana untuk membiayai pengeluaran dalam suatu daerah. Pengeluaran tersebut untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki struktur, menyediakan

fasilitas pendidikan dan kesehatan dan membiayai anggota polisi dan tetanta untuk menjaga keamanan.

Demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dalam suatu daerah tentu tidak lepas dari belanja daerah, yang mana belanja daerah dikategorikan dalam Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan. Dimana Pengeluaran Rutin adalah Pengeluaran Pembangunan yang dilakukan untuk penyelenggaraan roda pemerintah yang sifatnya tetap dari tahun ketahun. Sedangkan Pengeluaran Pembangunan adalah belanja yang penggunaanya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan PDRB dengan Harga Kostan.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

Adapun hipotesis yang dapat disimpulkan adalah:

- H_{01} Tidak Ada Pengaruh antara Belanja Rutin Daerah Kabupaen Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar
- H_{a1} Ada Pengaruh antara Belanja Rutin Daerah Kabupaen Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar
- H_{02} Tidak Ada Pengaruh antara Belanja Pembangunan daerah Kabupaen Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar

- Ha₂ Ada Pengaruh antara Belanja Pembangunan Daerah Kabupaen Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar
- H₀₃ Tidak Ada Pengaruh Signifikan antara Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Daerah Kabupaen Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar
- Ha₃ Ada Pengaruh Signifikan antara Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Daerah Kabupaen Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder runtun waktu (*time series*) tahunan dari tahun 2004 sampai dengan 2019 yang ditunjang studi kepustakaan.

B. Tempat dan waktu penelitian

Adapun tempat penelitian yang akan penulis lakukan ini bertempat di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar. Waktu penelitian dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1
Waktu Penelitian dan Bimbingan Skripsi**

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2020 – 2021						
		Februari – Maret	April – Mei	Juni - Agustus	September - Desember	Januari - Maret	Maret - April	Agustus
1	Observasi Awal							
2	Pengajuan Proposal							
3	Bimbingan Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Revisi Proposal							
6	Penelitian							
7	Bimbingan Penelitian							
8	Pengolahan Data							

9	Bimbingan Skripsi							
10	Siding Munaqasah							

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data skunder dari dokumen/publikasi/laporan penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2004 sampai tahun 2019.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara memanfaatkan dokumen yang sudah ada yang berasal dari catatan atau dokumen yang sudah ada yang berasal dari catatan atau dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa pengaruh APBD terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar adalah dengan menggunakan ekonometrika. Sedangkan metode analisa menggunakan model Kuadrant Terkecil (*Ordinary Least Square*).

Adapun model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda (Kusuma, 2016 :221), sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + B_2 X_2 + \mu$$

Kemudian model pemasaran diatas dapat diubah menjadi regresi linier berganda dalam bentuk logaritma natural, sebagai berikut:

$$LY = \alpha + \beta_1 LX_1 + B2LX_2 + \mu$$

Dimana :

- Y = Pertumbuhan ekonomi yang di proxy dengan PDRB
- X₁ = Pengeluaran rutin Daerah Kabupaten Tanah Datar
- X₂ = Pengeluaran pembangunan Kabupaten Tanah Datar

- L = Logaritma
 α = Konstanta
 β_1, β_2 = Koefisien Regresi
 μ = Term of Error

Sehingga bentuk matematis hipotesa tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$\frac{\partial LY}{\partial LX_1} < 0$$

Artinya jika terjadi kenaikan pada LX_1 (Pengeluaran Rutin) maka LY (Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB) akan mengalami kenaikan, *ceteris paribus*.

$$\frac{\partial LY}{\partial LX_2} < 0$$

Artinya jika terjadi kenaikan pada LX_2 (Pengeluaran Pembangunan) maka LY (Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB) akan mengalami kenaikan, *ceteris paribus*.

1. Uji Kesesuaian

a. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

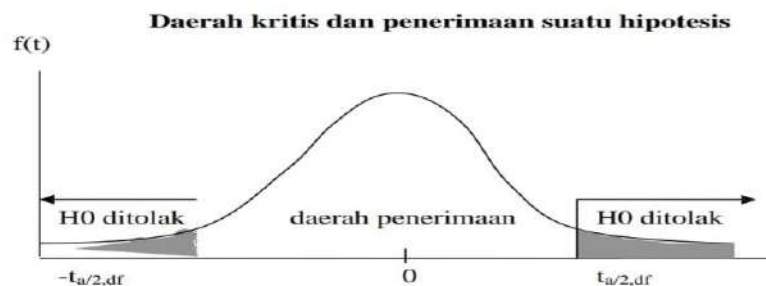
Dalam penelitian ini menggunakan *Adjust R²* berkisar antara 0 dan 1. Nilai *Adjust R²* yang mendekati 1 dependen semakin baik. Sebaliknya, bila nilai *Adjust R²* menjauh dari 1 maka kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen kurang baik (Ghozali, 2012).

b. Uji Statistik t (Uji t)

Uji t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat hipotesis berikut:

- 1) Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada pengaruh parsial variabel desentralisasi fiskal terhadap variabel kesejahteraan masyarakat.
- 2) Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh parsial variabel desentralisasi fiskal terhadap variabel kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.1
Uji Statistik t



Dalam gambar di atas terlihat bahwa hipotesis nol diterima bila berada dalam daerah selang keyakinan ($-t_{\alpha/2, df} < t_{\text{stat}} < t_{\alpha/2, df}$) yang berarti variabel independen tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel independen, dan begitupun sebaliknya.

c. Uji Statistik F (Signifikan Simulan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen terikat (Priyanto, 2010).

Uji F statistik digunakan untuk menguji variabel secara bersama-sama. Bila signifikan berarti tinjauan statistik menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya yaitu dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel dengan derajat kepercayaan tertentu. Uji F dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
2. Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak otolonal, maksudnya yaitu variabel bebas yang nilai korelasi antara sesama variabel bebas sama dengan nol (Priyanto, 2010) . Pengujian ini akan menggunakan Collinearity Statistics dengan melihat nilai dari Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai $VIF > 10$ atau nilai $\text{tolerance} < 0,1$ menunjukkan adanya

gejala multikolinearitas, sedangkan nilai VIF < 10 atau nilai tolerance $> 0,1$ menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas.

b. Uji Autokolerasi

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara kesalahan pengganggu ke- i dengan kesalahan pengganggu. Adanya korelasi tersebut akan menyebabkan nilai Covarian dari (pengganggu ke- I dan pengganggu) tidak sama dengan nol. Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data cross sectional). Beberapa penyebab autokorelasi salah satunya adalah data bersifat time series, yaitu data berupa runut waktu dimana nilai pada masa sekarang dipengaruhi oleh nilai masa lalu. Pengujian autokorelasi biasanya dilakukan dengan menghitung nilai statistik Durbin-Watson (DW). Nilai DW kemudian dibandingkan dengan nilai kritis Durbin-Watson untuk menentukan signifikannya (Nawari, 2010).

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang (sebelumnya) . Pengujian menggunakan uji Durbin-Watson untuk melihat gejala autokolerasi.

Hipotesanya adalah :

H_0 : Tidak ada autokorelasi positif

H_0^* : Tidak ada autokorelasi negatif

Kriteria pengujiaanya adalah sebagai berikut :

- 1) Bila D-W statistik terletak antara $0 < d < dl$, H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif ditolak.
- 2) Bila D-W statistik terletak antara $4 - dl < d < 4$, H_0^* yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif ditolak.

- 3) Bila D-W statistik terletak antara $d_u < d < 4 - d_u$, H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif maupun H_0^* yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif diterima.
- 4) Ragu-ragu tidak ada autokorelasi positif bila $d_l \leq d \leq d_u$
- 5) Ragu-ragu tidak ada autokorelasi negatif bila $d_u \leq d \leq 4 - d_l$

Gambar 3.2
Uji Autokorelasi



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang dikenal sebagai “Luhak Nan Tuo” terletak pada $00^{\circ} 17'$ (LS) Lintang Selatan – $00^{\circ} 39'$ (LS) Lintang Selatan $100^{\circ} 19'$ (BT) Bujur Timur – $100^{\circ} 51'$ (BT) Bujur Timur.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah 1.336 km^2 , terdiri dari 14 Kecamatan dan 75 Nagari (setingkat kelurahan di wilayah kota). Dilihat dari luas wilayah, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan luas $43,14 \text{ km}^2$. Sedangkan kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, yakni $204,31 \text{ km}^2$, kemudian diikuti Kecamatan X Koto yang luasnya $152,02 \text{ km}^2$.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tanah Datar memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Agam, dan Kabupaten Lima Puluh Kota; Selatan – Kabupaten Solok; Barat – Kabupaten Padang Pariaman; Timur – Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto. Secara geografi wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago, serta diperkaya pula dengan 5 sungai. Danau Singkarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan.

Diantara seluruh kecamatan yang ada, tiga kecamatan terletak pada ketinggian antara 700 s.d. 1.000 m di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjung Baru. Sementara itu empat

Kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 s.d. 550 m dari permukaan laut Sedangkan 7 Kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi, misalnya Kecamatan Lintau Buo yang terletak pada ketinggian antara 200 s.d. 750 m dari permukaan laut.

Ibukota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar, uniknya Kota Batusangkar ini berada pada perbatasan tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tanjung Emas atau tepatnya di Nagari Pagaruyung.

Kota Batusangkar lebih dikenal sebagai kota budaya, karena di Kabupaten Tanah Datar terdapat banyak peninggalan dan prasasti terutama peninggalan Istana Basa Pagaruyung yang merupakan pusat Kerajaan Minangkabau.

Tabel 4.1
Letak Astronomis Kecamatan-Kecamatan Di Kabupaten
Tanah Datar 2019

No	Kecamatan	Bujur timur	Lintang selatan
1	X Koto	100 ⁰ 18' 39" - 100 ⁰ 26' 59"	0 ⁰ 23' 38" - 0 ⁰ 33' 54"
2	Batipuah	100 ⁰ 22' 32" - 100 ⁰ 30' 00"	0 ⁰ 23' 38" - 0 ⁰ 34' 25"
3	Batipuah Selatan	100 ⁰ 22' 36" - 100 ⁰ 31' 44"	0 ⁰ 29' 38" - 0 ⁰ 35' 30"
4	Pariangan	100 ⁰ 28' 00" - 100 ⁰ 41' 35"	0 ⁰ 23' 35" - 0 ⁰ 30' 40"
5	Rambatan	100 ⁰ 30' 52" - 100 ⁰ 37' 20"	0 ⁰ 28' 16" - 0 ⁰ 38' 25"
6	Lima Kaum	100 ⁰ 28' 19" - 100 ⁰ 37' 24"	0 ⁰ 26' 42" - 0 ⁰ 31' 01"
7	Tanjung Emas	100 ⁰ 35' 43" - 100 ⁰ 44' 02"	0 ⁰ 26' 49" - 0 ⁰ 33' 31"
8	Padang Ganting	100 ⁰ 37' 49" - 100 ⁰ 47' 00"	0 ⁰ 28' 23" - 0 ⁰ 34' 29"
9	Lintau Buo	100 ⁰ 43' 42" - 100 ⁰ 50' 24"	0 ⁰ 26' 13" - 0 ⁰ 33' 59"
10	Lintau Buo Utara	100 ⁰ 38' 54" - 100 ⁰ 50' 56"	0 ⁰ 20' 21" - 0 ⁰ 28' 07"

11	Sungayang	100 ⁰ 34' 41"- 100 ⁰ 40' 31"	0 ⁰ 21' 16" - 0 ⁰ 26' 24"
12	Sungai Tarab	100 ⁰ 28' 26"- 100 ⁰ 36' 03"	0 ⁰ 22' 08" - 0 ⁰ 27' 18"
13	Salimpaung	100 ⁰ 28' 52"- 100 ⁰ 36' 09"	0 ⁰ 19' 00" - 0 ⁰ 25' 12"
14	Tanjung Baru	100 ⁰ 28' 52"- 100 ⁰ 35' 17"	0 ⁰ 17' 35" - 0 ⁰ 21' 51"

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar

2. Kondisi Penduduk

Penduduk menjadi salah satu variabel utama dalam melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan di segala bidang, karena tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Penduduk selain menjadi sasaran yang harus ditingkatkan kualitasnya juga menjadi salah satu komponen untuk menggerakkan program pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019 mencapai jumlah 348.219 jiwa yang tersebar di seluruh nagari atau seluruh jorong. Jumlah penduduk sebanyak itu jika dikelompokkan menurut jenis kelamin terdapat 170.272 jiwa penduduk laki-laki sedangkan sisanya sebanyak 177.947 jiwa adalah perempuan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 0,23 persen. Adapun rasio jenis kelaminnya (Sex Ratio) sebesar 95,69.

Tabel 4.2

Laju Pertumbuhan dan Sex Ratio Kabupaten Tanah Datar

Tahun 2004-2019

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio	LPP (%)
2004	160 394	173 632	334 026	92,00	0.41
2005	161 049	174 421	335 470	92,00	0.43
2006	161 639	174 937	336 576	92,40	0.33
2007	163 479	174 410	337 889	93,73	0.39

2008	164 837	174 437	339 274	94,50	0.41
2009	166 034	174 699	340 733	95,04	0.37
2010	165 231	174 561	339 792	94,66	0.28
2011	165 877	175 029	340 906	94,77	0.33
2012	166 481	175 430	341 911	94,90	0.29
2013	167 051	175 813	342 864	95,02	0.28
2014	167 677	176 198	343 875	95,16	0.29
2015	168 313	176 515	344 828	95,35	0.28
2016	168 772	176 934	345 706	95,39	0.25
2017	169 417	177 143	346 560	95,64	0.25
2018	169 808	177 599	347 407	95,61	0.24
2019	170 272	177 947	348 219	95,69	0.23

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar

Distribusi penduduk menurut kecamatan, tampak untuk beberapa kecamatan jumlah penduduknya relatif cukup banyak (30.000 jiwa ke atas). Dari 14 kecamatan yang ada, terdapat 5 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk diatas 30.000 jiwa seperti Kecamatan X Koto, Batipuh, Rambatan, Lima Kaum, dan Lintau Buo Utara. Namun demikian, jika jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan, tampak bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah di Lima Kaum yang mencapai 742 jiwa per km². Kecamatan Sungai Tarab merupakan kecamatan kedua yang terpadat penduduknya yakni sebanyak 417 jiwa per km². Sedangkan Kecamatan Batipuah Selatan merupakan kecamatan yang masih jarang dengan kepadatan penduduk sebesar 129 jiwa per km².

Tabel 4.3
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2019

No	Kecamatan	Penduduk	Kepadatan Penduduk (Per Km ²)
1	X Koto	44 207	291
2	Batipuah	30 115	209
3	Batipuah Selatan	10 664	129
4	Pariangan	19 618	257
5	Rambatan	33 527	260
6	Lima Kaum	37 103	742
7	Tanjung Emas	22 505	201
8	Padang Ganting	13 894	166
9	Lintau Buo	18 910	314
10	Lintau Buo Utara	36 250	177
11	Sungayang	17 294	264
12	Sungai Tarab	29 958	417
13	Salimpaung	21 233	349
14	Tanjung Baru	12 941	300
Tanah Datar		348 219	261

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2020

Ditinjau dari sudut kelompok umur, penduduk kabupaten tanah datar tergolong usia muda karena penduduk 0-14 tahun sebanyak 27,61 persen. Dimana 28,80 persen untuk penduduk laki-laki dan 26,47 persen penduduk perempuan. Persentase penduduk usia muda merupakan beban

yang sangat berarti bagi penduduk usia produktif (15-64) yang berjumlah 220.923 jiwa (63,44 persen).

Tabel 4.4
Penduduk Kabupaten Tanah Datar Menurut
Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin
Tahun 2019

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	15 526	14 964	30 490
5 – 9	16 642	15 906	32 548
10 – 14	16 868	16 235	33 103
15 – 19	14 334	14 263	28 597
20 – 24	10 467	10 307	20 774
25 – 29	10 388	10 440	20 828
30 – 34	11 037	11 056	22 093
35 – 39	10 540	11 276	21 816
40 – 44	11 180	12 051	23 231
45 – 49	11 258	12 139	23 397
50 – 54	10 485	11 488	21 973
55 – 59	10 102	11 298	21 400
60 – 64	7 826	8 988	16 814
65 – 69	5 993	6 847	12 840
70 – 74	3 537	4 437	7 974
75 +	4 089	6 252	10 341
Jumlah	170 272	177 947	348 219

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar 2020

3. Mata Pencarian

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris , lebih dari 70% bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan dan sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama adalah pertanian padi, palawija dan tanaman tahunan/bahan perdagangan antara lain:

- a. Tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar
 - b. Tanaman sayur-sayuran seperti cabai merah, bawang merah, bawang daun, sawi/petsai, terung, wortel, buncis, dan lain-lain sebagainya namun tidak dalam jumlah besar.
 - c. Buah-buahan seperti alpokat, jeruk, sawo, dan pisang
 - d. Perkebunan seperti karet, kakao, kulit manis, kelapa dan tebu.
- Komoditi yang cukup menjanjikan terhadap perekonomian Tanah Datar karena komoditas ekspor seperti Kopi Robusa, Kopi Arabika, Dan Kemiri.

B. Gambaran Perekonomian Kabupaten Tanah Datar

1. Perkembangan PDRB Kabupaten Tanah Datar

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dan posisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang dapat diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penguasaan dari nilai tambah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena

seluruh agregat dinilai menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan pada harga satu tahun dasar tertentu. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di peroleh dari perhitungan PDRB atas harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun n-1, kemudian disajikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari suatu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya bidang ekonomi. Angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa secara umum, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan dari tahun 2004-2012. Kabupaten Tanah Datar tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang terjadi ditingkat nasional/regional.

Tabel 4.5
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Tanah Datar Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2004-2019
(Rupiah)

Tahun	PDRB (Miliaran Rupiah)	PDRB Perkapita (Rupiah)
2004	1.863,49	7.369.054,48
2005	1.961,82	8.603.515,56

2006	2.076,13	10.076.448,71
2007	2.201,17	11.178.234,01
2008	2.331,71	12.620.790,44
2009	2.468,70	14.367.030,82
2010	2.614,19	16.017.171,57
2011	2.766,81	17.893.291,26
2012	2.924,84	19.794.526,53
2013	7.139,45	18.964.919,26
2014	7.552,75	20.453.636,41
2015	7.955,07	21.942.353,56
2016	8.355,07	23.431.070,70
2017	8.782,10	24.919.787,85
2018	9.227,06	26.408.504,99
2019	9.689,71	27.897.222,14

Sumber: Kabupaten Tanah Datar 2020

Dilihat dari tahun 2004, Kabupaten Tanah Datar sudah melakukan upaya memperbaiki ekonomi baik tingkat nasional maupun regional di Indonesia terlihat selalu melakukan perbaikan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB meningkat dari tahun 2004 yakni sebesar Rp. 1.863,49 miliar rupiah persen menjadi Rp. 9.689,71 miliar rupiah persen pada tahun 2019.

Kabupaten Tanah Datar salah satu Kabupaten yang sektor pertaniannya lebih unggul dibandingkan dengan dari sektor-sektor lainnya menurut PDRB berdasarkan lapangan usaha atas harga konstan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.6 dibawah ini. Dimana sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan ,besar peningkatan pada tahun 2016 menjadi Rp. 2.603.988 (Juta Rupiah) meningkat sebesar Rp 84.967 (Jutaan Rupiah). Sektor ini memberikan kontribusi pada tahun 2016 kepada PDRB sebesar 01.11 persen.

Sektor Pertambahan dan Penggalian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 16.029 (Jutaan Rupiah) mengalami menjadi Rp. 282.536 (Jutaan Rupiah) sektor ini memberikan kontribusi kepada PDRB 02.27 persen pada tahun 2019.

Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.338 (Jutaan Rupiah) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menjadi Rp. 1.105.782 (Jutaan Rupiah) pada tahun 2019 sektor ini memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 05.08 persen pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2019 kontribusi kepada PDRB menjadi 01.32 persen, penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2019 mencapai 03.36 persen.

Sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.715 (Jutaan Rupiah) mengalami peningkatan sebesar Rp. 173 (Juta Rupiah) menjadi Rp. 1.888 (Jutaan Rupiah) padatahun 2016, sektor ini memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 04.28 persen pada tahun 2015 mengalami peningkatan pada tahun 2016 yakni sebesar 05.37 persen, menjadi 10.05 persen.

Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang pada tahun 2015 sebesar Rp 9.454 (Jutaan Rupiah) mengalami peningkatan, pada tahun 2016 menjadi Rp. 10.003 (Jutaan Rupiah) . sektor ini memberikan distribusi kepada PDRB sebesar 05.42 persen pada tahun 2016 yakni sebesar 05.42 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 00.34 persen.

Sektor Konstruksi pada tahun 2015 sebesar Rp. 717.818 (Jutaan Rupiah) meningkat menjadi Rp. 772.651 (Jutaan Rupiah) pada tahun 2016, sektor ini memberi ditrsibusi kepada PDRB sebesar 06.37 persen pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 yakni sebesar 01.27 persen.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.014.514 (Jutaan Rupiah) mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi Rp. 1.084.685 (Jutaan Rupiah). Sektor ini memberikan distribusi sebesar 06.12 persen kepada PDRB pada tahun 2016 meningkat menjadi 07.32 persen.

Sektor Transportasi dan Pergudangan pada tahun 2015 sebesar Rp. 678.918 (Jutaan Rupiah) mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi Rp.736.316 (Jutaan Rupiah). Sektor ini memberikan distribusi sebesar 09.01 kepada PDRB pada tahun 2015 sebesar 08.45 persen pada tahun 2016 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2015 sebesar Rp. 47.413 (Jutaan Rupiah) dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada tahun 2019 menjadi Rp. 66.058 (Jutaan Rupiah). Sektor ini memberikan distribusi sebesar 07.04 persen kepada P DRB pada tahun 2015, pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun menjadi 09.29 persen.

Tabel.4.6

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanah Datar
Lapangan Usaha Tahun 2015-2019
(Jutaan Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.575.518	2.603.988	2.688.955	2.767.703	2.830.425
2.	Pertambahan dan Penggalian	228.662	243.890	251.837	266.507	282.536
3.	Industri Pengolahan	1.000.338	1.051.128	1.077.249	1.091.366	1.105.782
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.715	1.888	1.959	2.034	2.077
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan	9.454	10.003	10.362	10.621	11.147

	Smpah, Limbah dan Daur Ulang					
6.	Konstruksi	717.818	772.651	835.974	900.114	965.677
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	1.014.514	1.084.685	1.162.700	1.245.546	1.326.232
8.	Transportasi dan Pergudangan	678.918	736.316	791.816	848.757	919.195
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47.413	50.871	55.617	60.444	66.058
10.	Informasi dan Komunikasi	412.635	451.979	486.040	528.454	574.552
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	208.961	223.925	227.500	230.739	237.862
12.	Real Estat	125.131	130.989	136.123	142.237	149.943
13. 14.	Jasa Perusahaan	2.903	3.072	3.259	3.428	3.630
15.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	489.575	512.931	535.085	567.800	609.034
16.	Jasa Pendidikan	211.479	229.433	250.059	271.267	293.603
17.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101.571	107.466	115.288	124.283	133.053
18. 19. 20. 21.	Jasa Lain-nya	128.460	139.857	152.276	165.758	178.903
PDRB		7.955.070	8.355.072	8.782.098	9.227.057	9.689.707

Sumber: BPS Kab. Tanah Datar

Sektor Informasi dan Komunikasi pada tahun 2019 sebesar mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya menjadi Rp. 574.552 (Jutaan

Rupiah) sektor ini memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 09.05 persen dari tahun 2015 naik sebesar 00.07 persen pada tahun 2019.

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi pada tahun 2015 sebesar Rp 208.961 (Jutaan Rupiah) mengalami peningkatan menjadi Rp.237.862 (Jutaan Rupiah) pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 28.901 (Jutaan Rupiah) sektor ini memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 05.31 persen pada tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2015 sebesar 02.22 persen.

Sektor Real Estat pada tahun 2015 sebesar Rp. 125.131 (Jutaan Rupiah) selalu meningkat menjadi Rp. 149.943 (Jutaan Rupiah) pada tahun 2019. Sektor ini memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 06.17 persen pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan menjadi 05.42 persen pada tahun 2019.

Tabel 4.7
Distribusi PDRB Kabupaten Tanah Datar
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2015-2019
(%)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.46	1.11	3.26	2.93	2.27
2.	Pertambahan dan Penggalian	7.03	6.66	3.26	5.83	6.01
3.	Industri Pengolahan	2.14	5.08	2.49	1.31	1.32
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4.28	10.05	3.79	3.81	2.13
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.42	5.08	3.59	2.50	4.94
6.	Konstruksi	5.97	7.64	8.20	7.67	7.28
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	6.12	6.92	7.19	7.13	6.48
8.	Transportasi dan	9	8.45	7.54	7.19	8.30

	Pergudangan					
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.04	7.29	9.33	8.68	9.29
10.	Informasi dan Komunikasi	9.05	9.53	7.54	8.73	8.72
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.91	7.16	1.60	1.42	3.09
12.	Real Estat	5.77	4.68	3.92	4.49	5.42
13. 14.	Jasa Perusahaan	5.88	5.81	6.10	5.18	5.90
15.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.89	4.77	4.32	6.11	7.26
16.	Jasa Pendidikan	8.26	8.49	8.99	8.48	8.23
17.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.56	5.80	7.28	7.80	7.06
18. 19. 20. 21.	Jasa Lain-nya	7.39	8.87	8.88	8.85	7.93
PDRB		5.33	5.03	5.11	5.07	5.01

Sumber: BPS Kab. Tanah Datar

Sektor Jasa Perusahaan pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.903 (Jutaan Rupiah) dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada tahun 2019 menjadi Rp. 3.630 (Jutaan Rupiah). Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 06.28 persen kepada PDRB pada tahun 2015, pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan lagi dari tahun sebelumnya yang menurun dari tahun ketahun 2015 menjadi 06.30 persen.

Sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada tahun 2015 sebesar Rp. 489.575 (Jutaan Rupiah) dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada tahun 2019 menjadi Rp. 609.034 (Jutaan Rupiah). Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 03.29 persen kepada PDRB pada tahun 2015, pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan lagi dari tahun sebelumnya yang menurun dari tahun ketahun 2015 menjadi 07.26 persen.

Sektor Jasa Pendidikan pada tahun 2015 sebesar Rp. 211.479 (Jutaan Rupiah) dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada tahun 2019 menjadi Rp. 293.603 (Jutaan Rupiah). Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 08.26 persen kepada PDRB pada tahun 2015, pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang sebesar 00.50 persen.

Sektor Jasa Pendidikan pada tahun 2015 sebesar Rp. 211.479 (Jutaan Rupiah) dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada tahun 2019 menjadi Rp. 293.603 (Jutaan Rupiah). Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 08.26 persen kepada PDRB pada tahun 2015, pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang sebesar 00.50 persen.

Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial pada tahun 2015 sebesar Rp. 101.571 (Jutaan Rupiah) dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp. 133.053 (Jutaan Rupiah). Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 08.56 persen kepada PDRB pada tahun 2015, pada tahun 2019 yang mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 01.14 persen dari tahun sebelumnya.

Sektor Jasa Lain-nya pada tahun 2015 sebesar Rp. 128.460 (Jutaan Rupiah) dan mengalami peningkatan sampai pada tahun 2019 menjadi Rp. 178.903 (Jutaan Rupiah). Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 07.39 persen kepada PDRB pada tahun 2015, pada tahun 2019 yang mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 00.52 persen dari tahun sebelumnya.

2. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah Kabupaten Tanah Datar berfluktuasi namun pada umumnya mengalami kenaikan. Besar kecilnya pengeluaran pemerintah ini sangat tergantung pada besarnya penerimaan. Semakin besar penerimaan semakin besar pula pengeluaran. Pada tabel 4.8 di bawah ini dapat dilihat bahwa pengeluaran rutin lebih besar dibandingkan

pengeluaran pembangunan. Karena pengeluaran rutin lebih diprioritaskan dibandingkan pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran Rutin Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp. 64.169.967. sedangkan buat pengeluaran pembangunan sendiri mengalami empat kali penurunan pada tahun 2009 sebesar Rp. 61.330.413., tahun 2010 sebesar Rp. 40.580.765., tahun 2014 sebesar Rp. 5.016.651 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 39.597.814.,

Tabel 4.8

**Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2004-2019
(Jutaan Rupiah)**

Tahun	Pengeluaran Rutin	Pengeluaran Pembangunan	Total Pengeluaran
2004	176.901.366	42.998.226	219.899.592
2005	182.887.277	43.250.277	226.137.554
2006	258.527.701	73.638.403	332.166.104
2007	327.997.794	112.242.106	440.239.900
2008	477.583.007	138.336.793	615.919.800
2009	477.725.180	77.006.380	554.731.560
2010	530.119.885	36.425.615	566.545.500
2011	572.147.991	77.789.333	649.937.324
2012	618.271.478	86.485.201	704.756.679
2013	697.398.921	128.063.358	825.462.279
2014	808.384.033	123.046.707	931.430.740
2015	896.128.612	137.034.842	1.033.163.454
2016	918.248.351	187.784.872	1.106.033.223
2017	854.078.384	197.916.990	1.051.995.374
2018	916.510.091	158.319.176	1.074.829.267
2019	945.473.460	202.885.384	1.148.358.844

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar

C. Deskripsi Data

a. Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang terjadi sebab atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiono, 2015: 64). Yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Secara singkat variabel independen itu adalah variabel yang nilainya dapat mempengaruhi variabel lain. baik pengaruhnya yang positif maupun yang negatif. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengeluaran pemerintah (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan). Belanja Pemerintah akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan suatu negara maupun wilayah, meskipun demikian peningkatan Pengeluaran Pemerintah belum tentu berekibat baik terhadap perekonomian, oleh karena itu perlu dilihat efisiensi pengeluaran tersebut.

Dalam konteks otonomi daerah di Kabupaten Tanah Datar saat ini Pengeluaran Pembangunan lebih kecil dibandingkan Pengeluaran Rutin, hal itu dapat dilihat pada Tabel 4.8 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Tanah Datar. Maka dimana masalah pembangunan di Kabupaten Tanah Datar akan lambat dapat dituntaskan yang akhirnya yang berimbas pada lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

Pengeluaran Rutin merupakan variabel bebas (independen) pertama (X1) variabel bebas (independen) kedua (X2) adalah Pengeluaran Pembangunan. Fungsinya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. Dimana data pengolahan Pengeluaran Rutin yang penulis ambil dari Belanja Operasional dan Administrasi,

sedangkan Belanja Pembangunan data-datanya penulis ambil dari belanja modal dalam buku Kabupaten Tanah Datar dalam Angka.

b. Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat) variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015: 64). variabel dependen adalah variabel yang dikenal juga sebagai variabel yang menjadi akibat adanya variabel independen. Menurut fungsinya variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain, karenanya juga sering. Variabel dependen disebut juga dengan variabel terikat, variabel output, konsekuen, variabel tergantung kriteria, variabel terpengaruh dan variabel efek. Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Tabel 4.9
PDRB Kabupaten Tanah Datar
Dari Tahun 2004-2019

No	Tahun	PDRB (Rupiah)
1.	2004	1.863,490,000
2.	2005	1.961,820,000
3.	2006	2.076,130,000
4.	2007	2.201,170,000
5.	2008	2.331,710,000
6.	2009	2.468,700,000
7.	2010	2.614,190,000
8.	2011	2.766,810,000
9.	2012	2.924,840,000
10.	2013	7.139,450,000
11.	2014	7.552,750,000
12.	2015	7.955,070,000
13.	2016	8.355,070,000
14.	2017	8.782.100,000
15.	2018	9.227,060,000
16.	2019	9.689,710,000

Sumber: Kabupaten Tanah Datar 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat pengeluaran pembangunan dari tahun ketahun salalu meningkat, dengan peningkatan pengeluaran pembangunan tersebut setiap tahun ketahun yang dapat kita lihat dari tabel diatas yang peningkatan dari tahun 2004 sebesar Rp. 1.863,490,000 sampai tahun 2019 menjadi Rp. 9.689,710,000,. Dengan demikian diharapkan juga peningkatan pembangunan di daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun-ketahun. Pengeluaran Pembangunan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, yang bersifat tidak tetap dan bergabung pada proyek pembangunan yang dilaksanakan. Semakin besar dan semakin banyak kegiatan pemerinah, semakin banyak pula pengeluara pemerintah yang bersangkutan.

c. Analisis Regresi Berganda

Dalam bab ini penulis membuat suatu analisis dan evaluasi yang merupakan hasil interprestasi dari data-data yang telah diperoleh. Untuk menganalisis data di atas, penulis menggunakan model persamaan regresi linier berganda logaritma natural, seagai berikut:

$$LY = \alpha + \beta_1 LX_1 + \beta_2 LX_2 + \mu$$

Dari hasil pengolahan data yang diolah melalui aplikasi SPSS 22 yang dilakukan terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB (LY) sebagai variabel terikat sedangkan pengeluaran rutin (LX_1) dan pengeluaran pembangunan (LX_2) sebagai variabel bebas selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2019, berikut hasil analisis regresinya:

Model pengujian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Pengeluran Rutin dan Pengeluran Pembangunan) terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi), dengan persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah (Yusri, 2016:73)

Tabel 4.10
Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,127	1,337		,095	,926
	Pengeluaran Rutin	,738	,230	,626	3,210	,007
	Pengeluaran Pembangunan	,381	,235	,316	1,617	,130

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber Data: *Hasil Pengelolaan Spss 22*

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas yaitu Pengeluaran Rutin (X1) dan Pengeluaran Pembangunan (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = 0,127 + 0,738 X_1 + 0,381 X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan :

- a. Persamaan regresi tersebut dimana konstanta (a) untuk PDRB (Y) diperoleh nilai sebesar 0,127. Jika X1 (Pengeluaran Rutin), X2 (Pengeluaran Pembangunan), = 0, maka PDRB sebesar 0,127
- b. Koefisien regresi untuk variabel Pengeluaran Rutin (X1) = 0,738
Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Pengeluaran Rutin satuan maka variabel PDRB (Y) akan naik sebesar 0,738 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi tetap
- c. Koefisien regresi untuk variabel Pengeluaran Pembangunan (X2) = 0,381

Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Pengeluaran Pembangunan satuan maka variabel PDRB (Y) akan naik sebesar 0,381 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi tetap.

D. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Protabilitas, maka digunakan analisis regresi linier berganda dengan melakukan asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heterokedatasi. Berikut penjelasan beberapa uji asumsi klasik:

a) Uji Normalitas

Untuk melihat normalitas data dalam penelitian ini dapat dilihat dengan bantuan uji one-sample kolmogrov-smirnov test. Uji normalitas dikatakan normal apabila menghasilkan signifikan Asymp. Sig. (2-teiled) = 0,05 atau diatas 0,05. Dan apabila Jika nilai signifikansi > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal, sedangkan Jika nilai signifikansi < 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Berikut uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 22

Tabel 4.11

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		16
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,13386145
	Most Extreme Absolute	,208

Differences	Positive	,140
	Negative	-,208
Test Statistic		,208
Asymp. Sig. (2-tailed)		,064 ^c

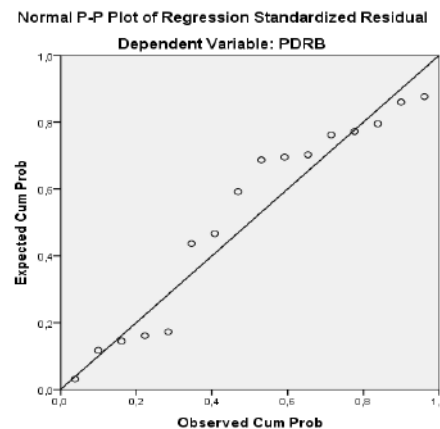
- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

Sumber Data : Hasil Pengolahan SPSS 22.0

Dari hasil uji normalitas yang dilakukan dapat dilihat pada tabel diatas yaitu dengan menggunakan uji one-sample kolmogrov-smirnov test bahwa asymp. Sig (2-tailed) berdistribusi normal karena hasil signifikan lebih besar dari ($\alpha = 0,05$) yaitu 0,064. Hal ini mengidentifikasi bahwa data residual berdistribusi normal.

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas Dengan Normal P-P Plot



Dari uji normal p-plot terlihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal hal ini menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi dari data diatas memenuhi asumsi normalitas. Dari kedua hasil uji diatas dapat dilihat bahwa variabel pertumbuhan ekonomi sudah berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang sama dengan nol (Ghozali, 2016:103). Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 22 di dapat uji multikolonieritas sebagai berikut:

Tabel 4.12

Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,127	1,337		,095	,926		
	Pengeluaran Rutin	,738	,230	,626	3,210	,007	,414	2,415
	Pengeluaran Pembangunan	,381	,235	,316	1,617	,130	,414	2,415

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber Data: Hasil Pengelolaan Spss 22

Berdasarkan hasil uji Multikolonieritas dengan metode VIF dan Tolerance, dimana dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk Pengeluaran Rutin lebih kecil dari 10 atau $VIF = 2,415 < 10$, untuk Pengeluaran Pembangunan nilai $VIF = 2,415 < 10$. Sedangkan dengan metode Tolerance nilainya harus berada diatas 0,1. Nilai Tolerance untuk Pengeluaran Rutin sebesar $0,414 > 0,1$. Nilai Tolerance untuk

Pengeluran Pembangunan sebesar $0,414 > 0,1$. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c) Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Tabel 4.13
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,892 ^a	,795	,763	,14093	,744

a. Predictors: (Constant), Belanja Pembangunan, Belanja Rutin

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber Data : hasil pengelolaan SPSS 22.0

Berdasarkan hasil tabel uji autokorelasi diketahui untuk nilai $DW = 0,744$ dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5% (0.05) dengan jumlah sampel 16 variabel independent 1 ($k=2$) = 1,16 Sehingga didapatkan hasil Du dari tabel $r = 1,539$ DW lebih besar dari batas Du dan DW kurang dari $(4 - Du) = 4 - 1,539 = 2,461$. sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

2. Uji kesesuaian

a) Koefesien Determinas (R^2)

Menurut Ghozali (2013:97) identifikasi koefisien determinasi ditujukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. Jika koefisien determinasi (R^2) semakin besar atau mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas (X) adalah besar terhadap variabel terikat (Y). Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti dengan variabel terikat

Tabel 4.14

Hasil Analisis
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,892 ^a	,795	,764	,32411	,752

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran pembangunan, Pengeluaran Rutin

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber Data: *Hasil Pengelolaan Spss 22*

Berdasarkan tabel diatas terlihat hasil Adjusted R Square sebesar 0.764 atau 76.4 %. Hal ini berarti bahwa 76.4 % pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Dan sisanya sebesar 24,6 % (100% - 76.4.%) dijelaskan oleh faktor faktor lain diluar model regresi.

b) Uji F- Statistik

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau

terkait. Membandingkan nilai f hasil perhitungan dengan nilai f menurut tabel bila nilai f hitung lebih besar dari pada nilai f tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima (ghozali, 2016:96):

Tabel 4.15

Uji F - Statistik

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,001	2	,501	25,200	,000 ^b
	Residual	,258	13	,020		
	Total	1,259	15			

a. Dependent Variable: PDRB

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pembangunan, Pengeluaran Rutin

Sumber Data: *Hasil Pengelolaan Spss 22*

Berdasarkan output SPSS diatas di dapat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 25,200 sedangkan F_{tabel} (dengan kepercayaan α sebesar 0,05 derajat bebas regresi sebesar 2 dan derajat bebas residual sebesar 16 ($K: N-K = (2/16-2) = (2 : 14) = 3,74$ yaitu sebesar, 3,74 karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi . Hal ini menjelaskan bahwa hipotesis H_a diterima.

c) Uji t -Statistik

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelesan/independen secara individual dalam menerangkan varians variabel independen. Membandingkan nilai statistik t titik kritis menurut tabel. apabila nilai statistik t hitung perhitungan lebih dibandingkan nilai t tabel. kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (ghozali, 2016:97)

Tabel 4.16
Uji t Statistik
Coefficients^a

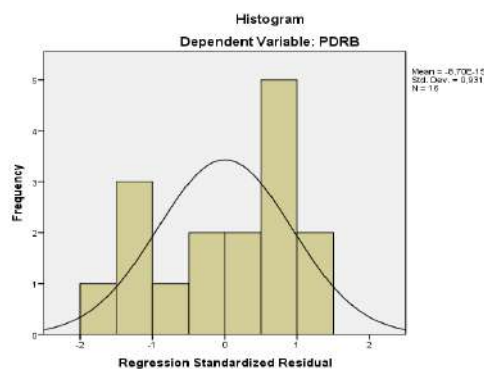
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,127	1,337		,095	,926
	Pengeluaran Rutin	,738	,230	,626	3,210	,007
	Pengeluaran Pembangunan	,381	,235	,316	1,617	,130

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber Data: Hasil Pengelolaan Spss 22

T_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi ($\alpha/2$; $n-k-1$) ($0,05/2$; $16-2-1$) ($0,025/ 13$) = 2,160 dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$, menurut priyatno (2012:158) dimana nilai $n =$ jumlah data dan $k =$ jumlah variabel independen, maka $df = 16-2-1 = 13$, jadi hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar 2.160.

Grafik 4.1



Sumber Data: Hasil Pengelolaan Spss 22

1) Pengujian Variabel Pengeluaran Rutin (X1)

Pada hasil SPSS bahwa nilai T_{hitung} sebesar 3,210 nilai ini lebih besar dari T_{tabel} sebesar 2.160. maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Rutin berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini berarti pemerintahan tahun 2004-2019 mampu menciptakan memberikan pengaruh yang baik kepada pertumbuhan ekonomi pada masyarakat Tanah Datar.

2) Pengujian Variabel Pengeluaran Pembangunan (X2)

Pada hasil SPSS bahwa nilai T_{hitung} sebesar nilai ini lebih 1,617 kecil dari T_{tabel} sebesar 2.160. maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pembangunan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karna masih kurang meratanya pembangunan di kabupaten tanah datar pada tahun 2004 sampai 2019.

E. Pembahasan Analisis Data

a. Pengaruh Pengeluaran Rutin Daerah Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tanah Datar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran Rutin berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Hal ini dibuktikan dengan koefisien korelasi yang mempunyai nilai hasil uji t untuk variabel Pengeluaran Rutin diperoleh Pada pengujian hasil SPSS bahwa nilai T_{hitung} sebesar 3,210 nilai ini lebih besar dari T_{tabel} sebesar 2.160. Pengeluaran Rutin adalah belanja untuk memelihara atau menyelenggarakan aktifitas pemerintahan sehari-hari. Hal ini sangat menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas, yang mampu menunjang tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan.

Pembangunan ini bersifat produktif karena dominan dibelanjakan untuk belanja-belanja yang memberi pengaruh baik pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pengeluaran Rutin ini terdiri atas: Belanja

pegawai, belanja barang, bunga dan cicilan utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya

Pengeluaran Rutin seperti belanja pegawai yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri, tunjangan dan pensiun. Belanja pegawai yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai dengan meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai. Dengan meningkatnya kesejahteraan tersebut juga dapat meningkatkan daya beli terhadap suatu barang atau jasa sehingga meningkatkan kegiatan perekonomian. Yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pegawai tersebut. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pegawai tentu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

b. Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini menemukan bahwa Pengeluaran Pembangunan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam periode penelitian 2004-2019, profitabilitas dari penelitian ini tidak dipengaruhi oleh Pengeluaran Pembangunan. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang dapat meningkatkan atau menurunkan nilai profitabil pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Hal ini dibuktikan. Pada hasil SPSS bahwa nilai T_{hitung} sebesar nilai ini lebih 1,617 kecil dari T_{tabel} sebesar 2.160. Adapun faktor-faktor yang dapat mengakibatkan Pengeluaran Pembangunan tidak dapat memberikan pengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi antara lain kurangnya pemanfaatan Pengeluaran Pembangunan pada pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak mampu memberi pengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi itu sendiri.

Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi Pengeluaran Pembangunan tidak akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, hal ini disebabkan oleh belanja modal pemerintah sangat dibatasi oleh sumber penerimaan yang lebih banyak berasal dari pemerintah pusat. Ditambah lagi penerimaan lebih banyak tersedot untuk Pengeluaran Rutin sehingga alokasi anggaran untuk belanja modal pemerintah yang tersedia, seharusnya dialokasikan secara tepat kepada proyek investasi yang mempunyai dampak multiplier yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. belanja pembangunan lebih di arahkan kepada pembangunan infrastruktur yang menopang Pertumbuhan Ekonomi seperti pembangunan jalan ke daerah produksi. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

c. Pengaruh Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan output SPSS di dapat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 25,200 sedangkan F_{tabel} (dengan kepercayaan α sebesar 0,05 derajat bebas regresi sebesar 2 dan derajat bebas residual sebesar 16 (k ; $n-k = (2/16-2) = 2:14$ didapat 3,74 yaitu sebesar 3,74 karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka disimpulkan bahwa secara simultan variabel Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Indra Susila, Yolanda Alinda dan Rian Hidayat pada tahun 2014 Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Semakin tinggi jumlah belanja rutin, belanja pembangunan dan investasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uji koefesian determinan terlihat hasil *Adjusted R square* sebesar 0,764 atau 74%. Hal ini dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan dan sisanya sebesar 24,6% (dari hasil pengurangan 100% - 76,4%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model regresi.

Hal in menunjukkan bahwa penerapan pengeluaran secara efesien mampu meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. semakin baik pemerintahan mengelola kedua komponen pengeluaran tersebut (Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan) maka semakin berdampak baik pula pada Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar dapat diambil kesimpulan:

1. Pengeluaran Rutin dan pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.
2. Pengujian Variabel Pengeluaran Rutin (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pada hasil SPSS bahwa nilai T_{hitung} sebesar 3,210 nilai ini lebih besar dari T_{tabel} sebesar 2.160. maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Rutin berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti pemerintahan tahun 2004-2019 mampu menciptakan memberikan pengaruh yang baik kepada Pertumbuhan Ekonomi pada masyarakat Tanah Datar.
3. Pengujian Variabel Pengeluaran Pembangunan (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pada hasil SPSS bahwa nilai T_{hitung} sebesar nilai ini lebih 1,617 kecil dari T_{tabel} sebesar 2.160. maka dapat disimpulkan bahwa Variabel pengeluaran Pembangunan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih kurang meratanya pembangunan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2004 sampai 2019.

B. Saran

Di Kabupaten Tanah Datar sektor pertanian adalah sektor pemberi distribusi yang terbesar kepada PDRB oleh sebab itu pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan sektor pertanian. Selain pemerintah Kabupaten Tanah Datar meningkatkan sektor pertanian pemerintah juga perlu meningkatkan di sektor-sektor lainya karena terlalu jauh perbedaan kontribusi yang diberikan oleh sektor-sektor lainya terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar dibandingkan sektor pertanian. Dengan membuat kebijakan yang mendorong peningkatan sektor-sektor lainya maka

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. UB Press : Jakarta.
- BPS. 2018. *Badan Pusat Statistik Sumatera Barat*. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat :Sumatera Barat .
- BPS. 2020. *Badan Pusat Statistik Sumatera Barat*. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat :Sumatera Barat .
- Deliarnov. 2007. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Faried, Annisa Illmi. 2019. *Perekonomian Indonesia Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis: Jakarta.
- Gampito. 2016. *Perekonomian Indonesia & Ekonomi Internasional*.STAIN Batusangkar Press : Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Universitas Diponegoro: Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Dengan Program IBM SPSS 19. edisi 5* Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, 1, 2016. *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS* Semarang: Universitas Diponegoro
- Halim, Abdu. 2007. *Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN Yogyakarta: Yogyakarta.
- Idris, Amiruddin. 2018. *Ekonomi Publik*. Deeplublish: Yogyakarta .
- Indriani, Epi. 2007. *Membina Kompetensi Ekonomi*. Grafindo Media Pratama: Bandung.
- Jhingan. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Grafindo Persada : Jakarta.
- Kabupaten Tanah Datar
- Kusuma, Tri Wijaya Nata. 2016. *Pengantar Statistik Industri*. UB Press : Malang.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. CV Andi Offset : Yogyakarta.

- Nawari. 2010. *Analisis Regresi dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17*. PT Elex Media Komputindo ISBN: . Jakarta.
- Nurul, Hudal. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenadamedia Group : Jakarta.
- Pamungkas, Bambang. 2013. *Dasar-Dasar Manajemenn Keuangan Pemerintah Daerah*. Kesatuan Press: Bogor.
- Parera, Jolne Myrell. 2018. *Aglomerasi Perekonomian di Indonesia*. CV IRDH : Malang.
- Patarai, Muhammad Idris. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. De La Macca. ISBN : Makassar.
- Pramono, Widodo Dwi. 2019. *Ekonomi Wilayah Untuk Perencanaan Tata Ruang*. s.l. : Deepublish : Yogyakarta.
- Priyanto, Duwi. 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta : Gava Media.
- Putra, Whindhu. 2018. *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada : Depok.
- Rapanna, Patta. 2017. *Ekonomi Pembangunan*. CV Sah Media : Makasar.
- Soemitro, Sutyastie. 2003. *Analisis Ekonomi Jawa Barat*. Unpad Press : Bandung.
- Sudaryo, Yoyon. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. CV Andi Offeset : Yogyakarta.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : CV Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2010. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* :Jakarta.
- Sumarsono, Hadi. 2017. *Indegenous Ekonomi Pembangunan Daerah*. PT Book Mart Indonesia : Malang.
- Supramono. 2010 :6. *Perpajakan Indonesia*. CV Andi : Yogyakarta.
- Suwandi. 2015. *Desentralisasi Fiskal*. Deepublish, ISBN: Yogyakarta.
- Yusri. 2016. ilmu pragmatik dalam perspektif kesopanan berbahasa
yogyakarta:deepublish

Wardana, Aditya. 2010. *Analisis Ekonomi Jawa Barat*. PT Karyamanunggal Lithomas : Jawa Barat.

Wulandari, PhaureulaArtha. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* . CV Budi Utama : Yogyakarta.

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN 1

**Data Pengeluaran Rutin (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2)
Dan PDRB ADHK (Y) Kabupaten Tanah Datar 2004-2019
(Jutaan Rupiah)**

Tahun	X1	X2	Y
2004	176901366	42998226	1863490000
2005	182887277	43250277	1961820000
2006	258527701	73638403	2076130000
2007	327997794	112242106	2201170000
2008	477583007	138336793	2331710000
2009	477725180	77006380	2468700000
2010	530119885	36425615	2614190000
2011	572147991	77789333	2766810000
2012	618271478	86485201	2924840000
2013	697398921	128063358	7139450000
2014	808384033	123046707	7552750000
2015	896128612	137034842	7955070000
2016	918248351	187784872	8355070000
2017	854078384	197916990	8782100000
2018	916510091	158319176	9227060000
2019	945473460	202885384	9689710000

LAMPIRAN 2

**Data Setelah di Logaritma Pengeluaran Rutin (X1), Pengeluaran Pemerintah
(X2) Dan PDRB ADHK (Y) Kabupaten Tanah Datar 2004-2019
(Jutaan Rupiah)**

Tahun	LN_X1	LN_X2	LN_Y
2004	18,99	17,58	7,53
2005	19,02	17,58	7,58
2006	19,37	18,11	7,64
2007	19,61	18,54	7,7
2008	19,98	18,75	7,75
2009	19,98	18,16	7,81
2010	20,09	17,41	7,87
2011	20,16	18,17	7,93
2012	20,24	18,28	7,98
2013	20,36	18,67	8,87
2014	20,51	18,63	8,93
2015	20,61	18,74	8,98
2016	20,64	19,05	9,03
2017	20,57	19,1	13,69
2018	20,64	18,88	9,13
2019	20,67	19,13	9,18

LAMPIRAN 3

**Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanah
Datar Menurut Lapangan Usaha (Rupiah) Dan PDRB AHKS
(Persen) Tahun 2004-2019**

Tahun	PDRB (Miliaran Rupiah)	PDRB Perkapita (Rupiah)	Laju Pertumbuhan AHKS (Persen)
2004	1.863,49	7.369.054,48	5,17
2005	1.961,82	8.603.515,56	5,27
2006	2.076,13	10.076.448,71	5,82
2007	2.201,17	11.178.234,01	6,02
2008	2.331,71	12.620.790,44	5,93
2009	2.468,70	14.367.030,82	5,87
2010	2.614,19	16.017.171,57	5,89
2011	2.766,81	17.893.291,26	5,84
2012	2.924,84	19.794.526,53	5,61
2013	7.139,45	18.964.919,26	5,85
2014	7.552,75	20.453.636,41	5,76
2015	7.955,07	21.942.353,56	5,33
2016	8.355,07	23.431.070,70	5,03
2017	8.782,10	24.919.787,85	5,11
2018	9.227,06	26.408.504,99	5,04
2019	9.689,71	27.897.222,14	4,99

Sumber: Kabupaten Tanah Datar 2020